

Russia-Ukraine Crisis: Where Do We Go from Here

Mutti Anggitta

- Penulis** : Chen Dongxiao dan Da Wei (editor)
Penerbit : Shanghai Institutes for International Studies dan Center for International Security and Strategy of Tsinghua University
Tahun terbit : 2022
Halaman : 32 halaman

Rusia memulai operasi militer di Ukraina pada 24 Februari 2022. Dalam lebih dari lima bulan terakhir, banyak akademisi, pengamat, dan praktisi di bidang hubungan internasional, pertahanan, dan ekonomi politik menghasilkan analisis mengenai penyebab konflik ini terjadi, proyeksi skenario eskalasi konflik, evaluasi dampak konflik tersebut dan rekomendasi kebijakan untuk mengatasinya, hingga spekulasi mengenai bagaimana negara-negara lainnya memandang dan mengambil sikap atas konflik yang terus berlanjut ini. "*Russia-Ukraine Crisis: Where Do We Go from Here?*" oleh Dongxiao dan Wei (editor) menawarkan sebuah kajian yang mencakup banyak aspek penting dalam kompleksitas konflik ini. Dengan menggunakan sudut pandang dari dalam Tiongkok, keduanya menghadirkan analisis terkait tatanan internasional, hubungan Tiongkok dengan Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan Rusia, serta perlucutan senjata nuklir.

Konflik Rusia-Ukraina yang memang merupakan konflik darat terbesar di Eropa pasca-Perang Dunia II menyita perhatian dunia dan memunculkan kekhawatiran akan lahirnya tatanan internasional yang baru. Tatanan baru ini adalah dunia yang didominasi dengan konfrontasi antara dua blok, yakni blok Barat yang dipimpin oleh AS, dan blok Rusia dengan Tiongkok serta beberapa negara kecil-sedang lainnya. Dongxiao dan Wei memprediksi bahwa dalam jangka panjang, tatanan dunia baru ini tidak akan menguntungkan Eropa. Hal ini disebabkan oleh tiga alasan. Pertama, Eropa tidak akan bisa mengimplementasikan otonomi strategis yang dicita-citakannya karena peran AS di Eropa akan semakin meningkat sehingga ketergantungan Eropa terhadap AS juga akan meningkat terutama dalam bidang militer. Kedua, tidak ada masalah geopolitik antara Tiongkok dan negara-negara Eropa, sehingga Eropa tidak perlu mengkonfrontasi Tiongkok, apalagi jika menimbang fakta bahwa pada 2021 Uni Eropa adalah salah satu dari lima mitra dagang teratas Tiongkok. Ketiga, Rusia secara geografis tidak bisa



pindah dan akan selalu menjadi tetangga Eropa. Oleh karena itu, permusuhan atau ketegangan hubungan antara Eropa dan Rusia dalam jangka panjang tidak akan menguntungkan Eropa.

Secara umum dalam beberapa dekade terakhir, hubungan antara Tiongkok dan AS memang sudah diwarnai dengan kompetisi. Seperti yang ditekankan oleh Dongxiao dan Wei, konflik Rusia-Ukraina semakin menambah kompleksitas bagi hubungan tersebut dengan meningkatkan kecurigaan dan permusuhan di antara Tiongkok dan AS, sekaligus mempercepat pengakhiran kerja sama mereka di sektor keuangan serta sains dan teknologi. Selain itu, konflik Rusia-Ukraina mempersulit Tiongkok dan AS dalam mengelola masalah Taiwan secara efektif. Sebenarnya, jauh sebelum konflik Rusia-Ukraina terjadi, pemerintahan Presiden Biden sudah mewarisi strategi Presiden Trump, yakni “*containing China with the Taiwan issue*” dengan meningkatkan signifikansi politik, ekonomi, dan keamanan Taiwan dalam strategi global AS. Presiden Biden secara eksplisit menempatkan Taiwan Relations Act (UU dalam negeri AS yang mendefinisikan hubungan resmi AS-Taiwan yang substansial tetapi non-diplomatis) dan Six Assurances (enam prinsip kebijakan luar negeri AS mengenai hubungan AS-Taiwan) secara paralel dengan tiga US-Tiongkok Joint Communiques sebagai dasar hukum dan politik untuk menangani masalah Taiwan dan hubungan lintas selat. Hal ini menunjukkan signifikansi politik dan strategis hubungan AS-Taiwan, dan tentunya menyebabkan ketidakpuasan di pihak Tiongkok yang memandang AS tidak lagi mengusung “One China Policy” dengan semestinya.

Seperti yang disampaikan oleh Dongxiao dan Wei, kecondongan AS terhadap Taiwan semakin terlihat nyata ketika Jake Sullivan (penasihat keamanan nasional Presiden Biden) mengatakan bahwa Tiongkok akan belajar dari konflik Rusia-Ukraina untuk mempersiapkan “invasi” ke Taiwan di masa depan. Selain itu, Janet Yellen (Menteri Keuangan AS) mengancam akan memberikan sanksi kepada Tiongkok serupa dengan sanksi yang diberikan kepada Rusia jika Beijing menggunakan kekerasan terhadap Taiwan. Presiden Biden pun pada kunjungannya ke Jepang 23 Mei lalu mengatakan bahwa militer AS akan membantu mempertahankan Taiwan jika terjadi perang di Selat Taiwan. Terakhir, kunjungan Nancy Pelosi (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS) ke Taipei pada 2 Agustus lalu menandakan dukungan yang sangat besar bagi Taiwan meskipun sebelumnya sudah mendapat peringatan dan ancaman pembalasan dari Tiongkok atas kunjungan tersebut. Beijing segera merespon kunjungan tersebut dengan memberikan ancaman dan melakukan latihan tempur gabungan, termasuk peluncuran rudal, di sekitar Pulau Taiwan dalam skala yang sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya.



Konflik Rusia-Ukraina juga berdampak bagi hubungan Tiongkok dengan Uni Eropa, terutama dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan. Uni Eropa sudah mengancam akan “menghukum” Tiongkok melalui kebijakan-kebijakan perdagangan jika Tiongkok memberikan bantuan militer ke Rusia atau membantu negara tersebut menghindari sanksi-sanksi yang diberikan oleh dunia internasional. Seperti yang juga disampaikan oleh Dongxiao dan Wei, opini publik di Eropa pun kembali mengusung pendapat populer yang menginginkan agar Uni Eropa mengakhiri ketergantungan pada pasar Tiongkok demi menjaga keamanan rantai pasokan, yang sesungguhnya gagasan tersebut sudah berkembang sejak pandemi COVID-19 terjadi.

Lebih lanjut, selain berbagai ancaman dan sanksi ekonomi akibat melancarkan serangannya ke Ukraina, Rusia juga “ditendang” dari keanggotaannya di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta diserukan oleh banyak negara agar juga “diusir” dari World Trade Organization (WTO) dan Group of Twenty (G20). Untuk keluar dari isolasi ini, Dongxiao dan Wei berargumen bahwa Rusia tidak punya pilihan selain lebih mengandalkan hubungannya dengan Tiongkok untuk keluar dari isolasi politik, sanksi ekonomi, dan blokade teknologi. Menurut mereka, Rusia juga akan menjadi lebih bergantung pada Tiongkok dalam bidang energi, ilmu pengetahuan dan teknologi, investasi, dan keuangan. Meskipun bukan aliansi, kedekatan dan kemitraan kedua negara ini sudah teruji dalam waktu yang lama. Hal ini terefleksikan setidaknya dari perdagangan bilateral keduanya yang meningkat sebesar 1.735% dalam 11 tahun terakhir, yakni dari US\$ 8 miliar pada tahun 2000 menjadi US\$ 146,8 miliar pada tahun 2021 (Global Times, 2022).

Apakah Rusia terisolasi? Itu adalah pertanyaan yang sayangnya tidak ditilik oleh Dongxiao dan Wei. Blok Barat memang sudah sangat jelas berupaya mengisolasi Rusia dengan serangkaian sanksi berturut-turut yang mempersulit transaksi perdagangan dan keuangan negara tersebut. Ditambah lagi Rusia yang tidak bisa mendapat pertolongan dari sekutunya yang merupakan negara-negara pariah, seperti Suriah, Venezuela, dan Kuba. Akan tetapi, terdapat beberapa fakta yang tidak berubah, yakni bahwa Rusia adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang tentunya memiliki hak veto, dan negara tersebut adalah salah satu aktor utama dalam berbagai bidang di level global. Mengisolasi Rusia adalah tantangan besar sekalipun bagi blok Barat yang dipimpin AS. Hal ini karena tetap ada sejumlah negara yang mengambil sikap dengan sangat hati-hati dan menolak untuk menuruti permintaan atau tekanan dari Barat. Sebagai contoh, sekitar seminggu setelah Rusia melakukan serangan ke Ukraina,



Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi untuk menegur Rusia karena telah menyerang Ukraina dan menuntut agar Moskow berhenti berperang dan menarik pasukan militernya. Resolusi tersebut tidak hanya ditolak oleh Rusia, tetapi juga oleh 4 negara lainnya, yakni Belarus, Korea Utara, Suriah, dan Eritrea. Terdapat juga 35 anggota PBB lainnya yang memilih untuk abstain, di antaranya adalah Tiongkok, India, Pakistan, Vietnam, Kuba, Iran, Irak, dan Afrika Selatan.

Begitu pula saat Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi pada 7 April lalu yang menyerukan agar Rusia ditangguhkan keanggotannya (diusir) dari Dewan HAM PBB. Selain Rusia, terdapat 23 negara yang menolak resolusi tersebut, termasuk Tiongkok, Korea Utara, Kuba, Iran, Suriah, dan Vietnam. Adapun 58 anggota PBB lainnya abstain, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, India, Pakistan, Brazil, Meksiko, Afrika Selatan, Irak, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Kuwait. Selain itu, dalam pemberian rangkaian sanksi ekonomi atas Rusia yang diserukan oleh Barat, banyak negara yang sebenarnya ingin mempunyai hubungan lebih erat dengan Barat atau bahkan membutuhkan dukungan Barat, namun menolak untuk berpartisipasi dalam rangkaian sanksi tersebut karena tidak berani menjadi bagian dalam melancarkan perang ekonomi melawan Rusia. Negara-negara ini antara lain adalah Tiongkok, India, Israel, Serbia, Brazil, Meksiko, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Lebih lanjut, berdasarkan data Economist Intelligence Unit (2022), 2/3 populasi dunia tinggal di negara-negara di mana pemerintahnya menolak untuk mengancam invasi Rusia ke Ukraina atau mengambil posisi netral. Oleh karena itu, cukup logis untuk menyimpulkan bahwa sepertinya Barat masih punya pekerjaan rumah yang cukup banyak jika ingin berhasil mengisolasi Rusia dan ekonominya.

Ketika membahas tentang rezim perlucutan senjata nuklir terkait konflik Rusia-Ukraina, terdapat satu pernyataan Dongxiao dan Wei lainnya yang perlu dikritisi. Mereka mengatakan bahwa “*A staunch supporter of the international arms control and nuclear disarmament regime, China adheres to its longstanding nuclear policy of maximum restraint and remains committed to the pursuit of a new path leading to a world of enduring peace and stability*” (hlm. 24, penekanan oleh penulis). Sejak 1964 hingga saat ini, Tiongkok memang terus menjaga jumlah senjata nuklirnya di angka yang cukup rendah, yakni 350 hulu ledak. Akan tetapi, berdasarkan laporan Kementerian Pertahanan AS pada November tahun lalu, Presiden Xi kini berambisi untuk mempunyai 1.000 hulu ledak nuklir pada tahun 2030. Jika tercapai, posisi Tiongkok akan berada jauh di atas Perancis dengan 290 hulu ledak dan Inggris dengan



225 hulu ledak. Ambisi ini jelas tidak senada dengan pernyataan Dongxiao dan Wei yang dikutip di atas, terlepas dari kebijakan “No First Use”.

Tiongkok memang negara pertama dan masih satu-satunya yang mengadopsi serta mematuhi kebijakan “No First Use” secara utuh, yakni komitmen untuk tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu, baik sebagai serangan pertama, atau sebagai serangan balasan atas serangan non-nuklir dalam bentuk apapun. India juga sebenarnya mengadopsi kebijakan “No First Use” ini, namun dengan pengecualian untuk respons terhadap serangan dengan senjata kimia atau biologi. Komitmen ini sejatinya pantas untuk dikagumi dan diapresiasi. Akan tetapi, “No First Use”, memiliki masalah kredibilitas. Pada kenyataannya, negara-negara bersenjata nuklir tidak percaya pada pernyataan rivalnya tentang “No First Use”. Sebagai contoh, Pakistan tidak mempercayai deklarasi “No First Use” India, dan ahli strategi daya tangkal (*deterrence*) AS juga mempertanyakan kepatuhan Tiongkok terhadap “No First Use”. Hal ini karena postur kekuatan nuklir ataupun rencana perang bukanlah deklarasi publik. Jika deklarasi publik suatu negara terefleksikan pada perubahan yang jelas dalam postur kekuatan dan perencanaan perang, maka deklarasi tersebut memiliki makna. Dalam kasus Tiongkok, yang terjadi adalah sebaliknya, ambisi Presiden Xi untuk meningkatkan jumlah hulu ledak nuklirnya hingga lebih dari 185% pada tahun 2030 mengindikasikan bahwa deklarasi “No First Use” Tiongkok tersebut tidak ada artinya. Ditambah lagi dengan berbagai latihan tempur yang dilakukan Tiongkok di sekitar Taiwan dalam rangka merespons kunjungan Pelosi ke Taipei baru-baru ini, semakin melemahkan kredibilitas “No First Use” Tiongkok.

